

BAB 1

PENDAHULUAN

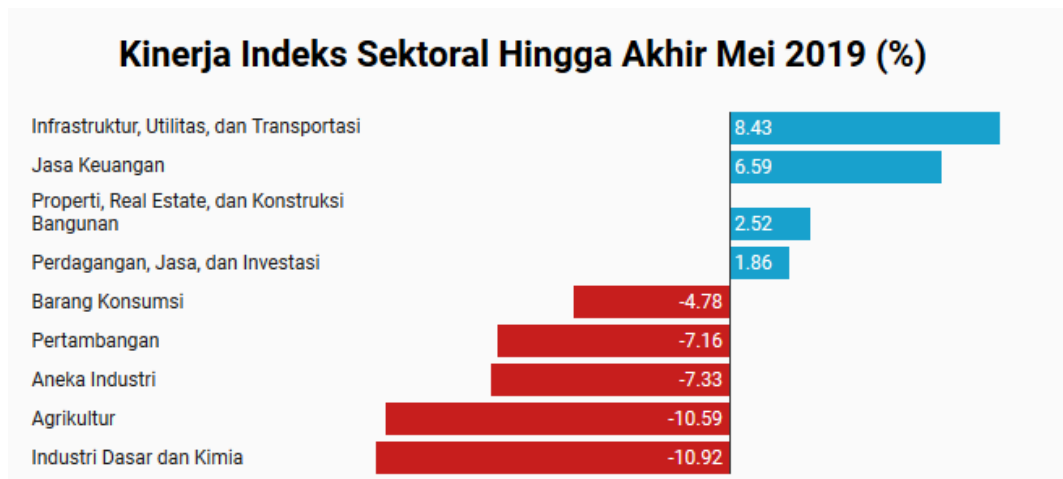
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Saat ini pemerintah tengah menjalankan pembangunan yang berpusat di bidang infrastruktur di Indonesia, karena pembangunan infrastruktur berhasil menjadi pendorong ekonomi dan juga mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Menurut Presiden Jokowi sektor infrastruktur salah satunya termasuk pembangunan jalan tol, merupakan salah satu keutamaan pembangunan pemerintah karena diperoleh dampak berantai yang akan dihasilkan. Konektivitas yang tercipta dengan pembangunan khususnya jalan tol akan mempercepat distribusi hasil pertanian dan industri ke berbagai tempat. Pembangunan infrastruktur yang baik akan meningkatkan kredibilitas pemerintah, sehingga hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi terutama diluar jawa. “sehingga kalau ada kepercayaan itu, ada arus uang masuk ke negara kita, akan ada arus ivestasi masuk ke indonesia, akan ada arus modal masuk ke indonesia,” ucap Presiden Jokowi (www.cbncindonesia.com).

Perusahaan infarastruktur, utilitas dan transportasi adalah fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh publik untuk memenuhi kebutuhan dalam lingkup sosial dan ekonomi. Secara teknik, infrastruktur dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Infrastruktur berdasarkan wujudnya dibagi dua yaitu infastruktur fisik dan infrastruktur organisasi. Infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur kelistrikan, sekolah, rumah sakit, ruang muka publik, dan lain-lain. Semestara infarstruktur organisasi biasanya berupa kebijakan, baik kebijakan pemerintah atau kebijakan perusahaan.

Pada tahun 2018, terdapat sembilan sektor saham penghuni IHSG, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi menjadi sektor dengan imbal hasil positif terbesar sebesar 8,43%. Apresaisi yang dibukukan sektor infrastruktur, utiloitas, dan transportasi didapatkan oleh kenaikan harga saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). Sepanjang tahun ini sampai dengan akhir mei di tahun

2019, harga saham emiten penyedia jasa telekomunikasi pelat merah tersebut menguat sebesar 4% dari Rp 3.750/saham menjadi Rp 3.900/saham. Saham TLKM merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dalam sektor infrastruktu, utilitas, dan transportasi. Per akhir 2018, kapitalisasi pasar TLKM setara dengan 50,6% dari kapitalisasi pasar sektor infrastruktur, utilitas, transportasi. Harga saham TLKM menguat seiring dengan kinerja keuangannya yang menggemberikan. Sepanjang kuartal-I 2019, perusahaan membukukan laba bersih senilai Rp 6,22 Triliun, naik sebesar 8,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Berikut ini informasi Kinerja Indeks Sektoral Hingga Akhir Mei 2019.



Gambar 1.1 Kinerja Indeks Sektoral Hingga Akhir Mei 2019

Salah satu yang tergolong ke dalam perusahaan jasa adalah sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Sektor infrastruktur ini dibagi lagi menjadi beberapa sub sektor. Pada tahun 2018, tercantum sebanyak 60 perusahaan yang ada dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dengan pembagian sub sektor energi sebanyak 7 perusahaan, sub sektor jalan tol, pelabuhan, bandara dan sejenisnya sebanyak 3 perusahaan, sub sektor telekomunikasi sebanyak 5 perusahaan, sub sektor transportasi sebanyak 35 perusahaan, dan sub sektor konstruksi non bangunan sebanyak 10 perusahaan. Selanjutnya adalah jumlah sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia:

Tabel 1.1 Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi

No.	Sub Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	Jumlah
1.	Energi	7
2.	Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara & Sejenisnya	3
3.	Telekomunikasi	5
4.	Transportasi	35
5.	Konstruksi Non Bangunan	10

Sumber : (www.sahamok.com)

Penelitian ini berpusat pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Peneliti menggunakan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi karena sektor infrastruktur memang merupakan salah satu sektor unggulan untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang produktif tidak mungkin tercapai apabila tidak didukung ketersediaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang memadai. Presiden Jokowi sendiri sudah berulang kali memberitahukan bahwa sektor infrastruktur termasuk pembangunan jalan tol, merupakan salah satu keutamaan dalam pembangunan pemerintah karena dampak berantai yang akan dihasilkan.

Konektivitas yang tercipta dengan pembangunan khususnya jalan tol akan dapat mempercepat distribusi hasil pertanian dan industri ke berbagai tempat. Pembangunan infrastruktur yang baik akan meningkatkan kredibilitas pemerintah, sehingga akan membuat kepercayaan pada investor dalam berinvestasi terutama diluar jawa. “sehingga kalau ada kepercayaan itu, ada arus uang masuk ke negara kita, akan ada arus ivestasi masuk ke indonesia, akan ada arus modal masuk ke indonesia,” ucap Presiden Jokowi (www.cbncindonesia.com). Oleh sebab itu sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi merupakan kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi serta tergolong dalam pemerataan pembangunan di Indonesia.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Salah satu hal yang paling penting di perusahaan adalah laporan keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2015:1 menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah penyampaian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja perusahaan. Sebuah perusahaan akan sangat memerlukan laporan keuangan yang disajikan secara lengkap menjadi laporan pertanggungjawaban dari semua divisi atas pengelolaan perusahaan tersebut.

Laporan keuangan bukan hanya suatu wujud pertanggungjawaban melainkan Laporan ini juga mempunyai berbagai macam fungsi seperti membantu pihak manajemen mengetahui resiko keuangan, membantu seluruh pihak perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan, menilai persentase laba yang bisa dicapai, hingga membuat perencanaan bisnis. Laporan keuangan perusahaan perlu ditampilkan secara kuantitatif dan kualitatif yang harus mempunyai karakteristik relevan, handal, mudah dimengerti, dan memiliki unsur perbandingan. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan (kreditor, investor, manajemen internal, pemerintah, auditor) akan mudah dalam membaca laporan keuangan tersebut. Akibat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, maka informasi yang diperoleh dalam laporan keuangan haruslah wajar, mudah dipahami, dapat dipercaya dan tidak menjerumuskan bagi pemakainya sehingga dapat melengkapi kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan. Agar dapat menyampaikan informasi yang wajar, mudah dipahami dan dapat dipercaya bahwa diperlukan adanya proses dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh KAP melalui seorang auditor independen. Auditor juga bertanggungjawab dalam menyusun dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memuaskan apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan (IAI, 2016). Selain itu, auditor juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesalahan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya ketika periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang

tengah diaudit. Dalam pemeriksaan, auditor dituntut untuk bersifat objektif dan independen sebab pada dasarnya klien memerlukan jasa auditor untuk mengaudit laporan keuangannya dan diharapkan auditor memberikan suatu opini auditnya (Standar Audit 570).

Auditor switching adalah pergantian KAP yang mempunyai sifat *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* yang bersifat *mandatory* adalah pergantian KAP yang terjadi karena melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku dan bertujuan untuk meningkatkan independensi auditor sehingga bisa menambah kualitas audit terhadap laporan keuangan (Pawitri & Yadnyana, 2015). *Auditor switching* yang bersifat *voluntary* adalah pergantian KAP yang terbentuk sebab suatu alasan atau terdapat beberapa faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP yang bersangkutan di luar dari ketentuan regulasi yang berlaku. Pada penelitian ini menggunakan *auditor switching* secara *voluntary*, permasalahan yang timbul ketika perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary* karena para pengguna laporan keuangan akan curiga dengan penyebab dilakukannya *auditor switching* yang dilakukan diluar regulasi yang berlaku (Pratiwi & RM, 2019). Peraturan *auditor switching* ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 2008 pasal 3 yang menyatakan :

1. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
2. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

Selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2015 pasal 11 pada ayat 1 dan 3 yang menyatakan:

1. Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
2. Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Industri di sektor Pasar Modal;
 - b. Bank umum;
 - c. Dana pensiun;
 - d. Perusahaan asuransi/reasuransi; atau
 - e. Badan Usaha Milik Negara;
3. Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi.
4. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Sementara itu, *auditor switching* yang bersifat *voluntary* adalah pergantian KAP yang terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP yang bersangkutan di luar ketentuan regulasi yang berlaku (Pawitri & Yadnyana, 2015). Permasalahan timbul ketika perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary*, karena para pemakai laporan keuangan akan curiga dengan penyebab dilakukannya *auditor switching* yang dilakukan diluar regulasi yang berlaku.

Pada tahun 2018, terdapat kasus *auditor switching* secara *voluntary* pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Perusahaan yang mendapat kasus adalah PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang terkena sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena permasalahan pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018, dalam laporan keuangan tersebut, mengatakan bahwa Garuda Indonesia mencatatkan nilai kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) senilai US\$ 239 juta atau setara Rp 3,5 triliun. Dana tersebut masih berupa piutang namun sudah diakui

oleh manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan. Perusahaan sebaiknya mencatatkan kerugian sebesar US\$ 213 juta di tahun 2017 yang berubah menjadi laba US\$ 5 juta pada tahun 2018.

Menurut Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, selaku auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material atau disebut wajar tanpa pengecualian. Sanksi diberikan sesudah Kemenkeu mengecek AP/KAP tersebut terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018. Dalam pemeriksaan itu Kemenkeu menemukan adanya pelanggaran, khususnya pengakuan pendapatan atas kesepakatan kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi. “Pembekuan izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) terhadap AP Kasner Sirumapea karena melakukan kesalahan berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen. Keputusan untuk mengganti KAP juga disampaikan Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol yang menyampaikan arahan dari Menteri BUMN Rini Soemarno yang meminta Garuda Indonesia untuk mengganti auditor independen sudah dibahas oleh komisaris dan direksi, sehingga KAP sebelumnya tidak akan dipakai lagi oleh Garuda Indonesia pada laporan keuangan 2018. Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengaku telah menerima arahan dari Menteri BUMN Rini Soemarno, perusahaan hendak melakukan tender untuk KAP yang baru (www.kompas.com, 2019).

Dari fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. Garuda Indonesia Tbk melakukan *auditor switching* secara *voluntary* karena perusahaan tersebut melakukan pergantian auditor maupun KAP tidak berdasarkan dengan regulasi atau peraturan yang berlaku. Dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diperoleh suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut, sedangkan permasalahan yang berlangsung pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018 yang di audit oleh Akuntan Publik (AP) Kasner

Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, sebagai auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) yang menyampaikan bahwa Garuda Indonesia mencatatkan nilai kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) senilai US\$ 239 juta atau setara Rp 3,5 triliun. Dana tersebut masih bersifat piutang tetapi telah diakui oleh manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan. Perusahaan sebaiknya mencatatkan kerugian sebesar US\$ 213 juta di tahun 2017 yang berubah menjadi laba US\$ 5 juta pada tahun 2018. Menteri BUMN Rini Soemarno meminta Garuda Indonesia untuk mengganti auditor independen. Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengaku telah menerima arahan dari Rini. Perusahaan bakal melakukan tender untuk KAP yang baru. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan *auditor switching* secara *voluntary* menarik untuk dikaji, hal ini disebabkan karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi pergantian auditor maupun KAP.

Komite audit adalah salah satu aspek implementasi *Good Corporate Governance* yang mempunyai fungsi dalam melaksanakan pengawasan atas kinerja auditor dengan menetapkan auditor eksternal. Komite audit juga diharapkan bisa menjaga suatu keindependisian auditor untuk mengurangi konflik yang membuat terjadinya pergantian auditor. Berdasarkan tujuan tersebut, kemudian dapat disimpulkan maka setiap komite audit dituntut untuk mempunyai karakteristik seperti: bersikap dan berpikir independen, memberikan komitmen waktu untuk tugas-tugasnya, mempunyai keahlian yang memadai, dan memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan andal (Nyoman Badera Merawati & Suardika, 2015). Hubungan komite audit terhadap *auditor switching* adalah semakin tinggi komite audit pada perusahaan maka akan semakin berkurang adanya pergantian auditor. Karena ketika komite audit sudah memberikan kepastian mengenai kebenaran dan keandalan dalam laporan keuangan sudah benar maka auditor melakukan audit nya sudah benar dan tidak terjadi kesalahan sehingga tidak adanya pergantian auditor. Sehingga hubungan komite audit terhadap *auditor switching* negatif. Hal ini sejalan dengan penelitian (Luh Komang Merawati, I Dewa Nyoman Badera, & Suardika, 2015) (Totok

Budisantoso & Probohudono, 2017) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *auditor switching* dan bertolak belakang dengan penelitian (Sihotang, 2014), (Purwoningsih, 2016) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang dapat memengaruhi perusahaan melakukan pergantian auditor adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besarnya ukuran dalam sebuah perusahaan yang nantinya dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Aktiva yang besar bisa diartikan bahwa ketika modal yang akan ditanam semakin banyak maka akan semakin banyak pula penjualan dan peredaran uang yang ditanam, dan juga nantinya akan semakin banyak dan semakin besar kapitalisasi pasar maka akan semakin besar pula perusahaan akan dikenal oleh masyarakat. Besar dan kecilnya ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aset (Luthfiyanti, 2016). Para investor akan lebih terdorong dalam menanamkan modalnya pada perusahaan dengan ukuran besar dibandingkan perusahaan dengan ukuran kecil. Hubungan ukuran perusahaan terhadap *auditor switching* adalah perusahaan dengan menggunakan total aset yang besar akan membuat semakin berkurang adanya pergantian auditor. Karena ketika total aset perusahaan yang besar, perusahaan tersebut tidak akan sembarangan untuk mengganti auditornya dan cenderung lebih memilih auditor dari KAP *big four*. Sedangkan perusahaan yang memiliki total aset kecil mereka cenderung akan lebih sering mengganti auditornya karena total aset yang kecil tidak terlalu kompleks dan pergantian auditor cenderung memilih auditor yang tidak tergolong KAP *big four*. Sehingga hubungan ukuran perusahaan terhadap *auditor switching* negatif. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rimadani, 2018) (R. Meike Erika Dwiyantri, 2014), yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap *auditor switching* dan bertolak belakang dengan penelitian Pradhana & Suputra (2015) dan Silvy Ayu Putri Pradita & Laksito (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Sementara terdapat beberapa jenis opini audit, salah satunya adalah *opini going concern*. *Opini going concern* merupakan *opini* audit yang dikeluarkan oleh

auditor dimana seorang auditor hendak menentukan perusahaan yang diaudit apakah dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (Arsih & Anisykurlillah, 2015). *Opini going concern* adalah hal yang tidak diharapkan bagi setiap perusahaan karena dampak yang dihasilkan berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan, dan karyawan terhadap manajemen perusahaan (Artawijaya & Dwija, 2016). Hubungan *Opini going concern* terhadap *auditor switching* adalah semakin tinggi perusahaan mendapatkan *opini going concern* maka akan semakin tinggi adanya pergantian auditor. Karena ketika perusahaan mendapatkan banyak *opini going concern* dari auditor yang ada diperusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya maka perusahaan tersebut akan mencari *opini* dari auditor yang lain dan akan melakukan pergantian auditor. Sehingga hubungan *opini going concern* terhadap *auditor switching* positif. Hal ini sejalan dengan penelitian Adhiputra (2015) dan Gideon Saputra (2017) yang menyatakan *opini going concern* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* dan bertolak belakang dengan penelitian Mahindrayogi & Suputra (2016) dan Luki Arsih (2015) yang menyatakan bahwa *opini going concern* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Audit delay adalah keterlambatan penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan auditor independen (Pawitri & Yadnyana, 2015). *Audit delay* bisa memengaruhi ketentuan yang akan diambil bagi investor, karena apabila perusahaan terlambat mengeluarkan laporan audit maka investor tidak dapat mengetahui informasi mengenai keberlangsungan usaha perusahaan untuk ketentuan dalam berinvestasi. Stocken (2000) dalam (Pawitri & Yadnyana, 2015) menyatakan bahwa apabila suatu penyelesaian tugas audit mempunyai rentang waktu yang cukup lama, sehingga akan mengakibatkan keterlambatan mempublikasikan laporan keuangan ke pasar modal dan berpengaruh pada *auditor switching* (Pawitri & Yadnyana, 2015). Hubungan *audit delay* terhadap *auditor switching* adalah semakin tinggi adanya *audit delay* pada perusahaan maka akan semakin tinggi pula adanya pergantian auditor. Karena ketika sebuah perusahaan melakukan keterlambatan

mempublikasikan laporan audit atau yang disebut dengan *audit delay* maka investor tidak dapat melihat informasi mengenai keberlangsungan usaha perusahaan tersebut dalam berinvestasi. Hal itu dapat membuat perusahaan untuk mencari auditor yang lain yang tidak melakukan keterlambatan dalam mempublikasikan laporan audit. Sehingga hubungan *audit delay* terhadap *auditor switching* positif. Hal ini sejalan dengan penelitian Aulia Rimadani (2018) dan Ella Soraya & Musfiari Haridhi (2017) yang menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* dan bertolak belakang dengan penelitian Pratiwi & RM, 2019 dan Yulius Kurnia Susanto (2018) yang menyatakan bahwa *audit delay* tidak mempengaruhi *auditor switching*.

Berdasarkan latar belakang diatas dan inkonsistensi sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* dan diharapkan nantinya akan bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian karena adanya inkonsistensi, dari hasil penelitian sebelumnya mengenai variabel komite audit, ukuran perusahaan, *opini going concern*, *audit delay*, dan juga masih sedikit ditemukannya penelitian mengenai komite audit yang diproksikan ke dalam keahlian akuntansi dan keuangan komite audit sebagai variabel independen, maka peneliti tertarik untuk mengkaji kembali variabe-variabel dalam penelitian ini seperti komite audit, ukuran perusahaan, *opini going concern*, dan *audit delay* yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*. Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan objek penelitian yang berbeda dan waktu yang berbeda maka nantinya akan menunjukkan hasil empiris yang berbeda. Dari penjelasan diatas maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Opini Going Concern*, dan *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching*. (Studi empiris pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018).”**

1.3 Perumusan Masalah

Hasil kinerja perusahaan dan keadaan keuangan perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangan. Menurut perusahaan yang telah *go public*, sangat diperlukan jasa auditor selama memberikan *opini* audit yang berguna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagai auditor, maka sangat diperlukan sikap independen. Untuk menghindari hilangnya independensi dari seorang auditor, maka diadakan *auditor switching*. Pergantian auditor ada 2 jenis yaitu secara *mandatory* dan *voluntary*. Menurut dalam berita yang ada, di Indonesia masih ditemukan kasus pergantian auditor secara sukarela seperti fenomena yang diangkat pada penelitian ini yaitu kasus pergantian auditor secara sukarela yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Pada perusahaan tersebut terdapat banyak kesalahan dalam laporan tahunan 2018. Konsekuensi dari kesalahan tersebut, KAP yang bertugas mengaudit PT Garuda Indonesia mengeluarkan *opini* wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Maka dari itu, PT Garuda Indonesia melakukan pergantian KAP karena dikeluarkannya *opini* yang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi *auditor switching* yang mana belum banyak peneliti yang mengamati pada pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, *opini going concern*, dan *audit delay*. Penentuan variabel independen ini dilakukan karena masih terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya sehingga masih penting untuk dikaji kembali mengenai faktor yang mempengaruhi *auditor switching*, yaitu komite audit, ukuran perusahaan, *opini going concern*, dan *audit delay*.

Berlandaskan penelitian terdahulu telah menguji pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, *opini going concern*, dan *audit delay* terhadap *auditor switching*. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti menguji variabel-variabel tersebut dalam satu model yang serupa. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komite audit, ukuran perusahaan, *opini going concern*, *audit delay*, dan *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018?

2. Apakah terdapat pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, opini *going concern*, dan *audit delay*, secara simultan terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh parsial dari:
 - a. Komite audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?
 - b. Ukuran perusahaan terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?
 - c. *Opini going concern* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?
 - d. *Audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, *opini going concern*, dan *audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Berdasarkan pertanyaan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana komite audit, ukuran perusahaan, *opini going concern*, *audit delay*, dan *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, *opini going concern*, *audit delay*, dan *auditor switching* pada perusahaan sektor

infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh parsial dari:
 - a. Komite audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
 - b. Ukuran perusahaan terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
 - c. *Opini going concern* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
 - d. *Audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Sebagai syarat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis mengenai *auditor switching*.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi auditor
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tujuan informasi mengenai pengaruh bagaimana komite audit, ukuran perusahaan, *opini going concern*, dan *audit delay*, terhadap ketentuan *auditor switching*.
2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan dan menjadi gambaran bagi perusahaan untuk memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *auditor switching*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk memberikan keterangan yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang memuat informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan berkenaan dengan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berhubungan dengan fenomena yang diangkat untuk menjadi pokok bahasan, rumusan masalah, yang menjabarkan identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis atau praktik serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang mempererat penelitian dan menjelaskan luas serta batasan lingkup penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan hipotesis dari penelitian serta referensi dari penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini memuat jenis penelitian, variabel penelitian, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, teknik analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan akan penelitian serta pemaparan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

